

ANALISIS PENGARUH PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH (BPKP) TERHADAP OPINI DAN TEMUAN AUDIT

REN ADAM ABDILLAH SIREGAR
DYAH SETYANINGRUM
Universitas Indonesia

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the effect of Indonesia's government internal auditor (BPKP) role on audit opinion and findings of local government financial statements. Role of BPKP consists of assistance, performance and operational audit, monitoring and evaluation, socialization and technical guidance as well as assistance on the financial statement quality improvement and follow-up of audit findings. The sample use in this research is local government financial statement for fiscal year 2012. The results show that performance and operational audit and assistance on the financial statement quality improvement and follow-up of audit findings. The sample use in this research is local government financial statement for fiscal year 2012. The results positively affects the audit opinion. This result implies that BPKP's performance and operational audit role to has worked effectively and local government has to pay attention on following-up audit recommendation to improve financial statement quality.

Keywords: Assistance; Audit Opinion and Findings; Local Government Financial Statement; Monitoring and Evaluation; Performance and Operational Audit; Socialization and Technical Guidance

1. Pendahuluan

Pada sektor publik di Indonesia terdapat dua lembaga pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu audit eksternal dan audit internal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai auditor eksternal yang merupakan badan tertinggi dalam pemeriksaan keuangan di Indonesia, sedangkan, fungsi audit internal dalam pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Perbedaan kedua APIP tersebut adalah BPKP merupakan lembaga di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan Inspektorat terbagi atas Inspektorat Jenderal di tingkat kementerian dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di tingkat pemerintah daerah.

Pada pemerintahan Indonesia, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab pada Presiden bertugas untuk melakukan pengawasan intern pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, pengawasan intern merupakan unsur penting dalam

manajemen. Pengawasan intern diperlukan untuk mengenali dan melakukan tindakan preventif dini atas kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Rosjidi (2001), sesuai dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), paradigma lama fungsi BPKP sebagai auditor pemerintah (*government auditor*) berubah menjadi dan mengemban paradigma baru sebagai *government evaluator*. Akan tetapi, BPKP tetap berfungsi sebagai auditor untuk permintaan audit dari pemerintah pusat dan kasus-kasus tertentu seperti kasus yang melibatkan unsur tindak pidana korupsi.

Wicaksono (2012) menyatakan bahwa pendampingan BPKP merupakan faktor pendukung yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit, dan pendampingan BPKP memiliki pengaruh negatif terhadap opini audit dan berpengaruh positif terhadap temuan audit. Nuraeni (2011) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kerja sama pendampingan baik dengan BPKP ataupun dengan konsultan di luar BPKP. Wicaksono (2012) dalam penelitiannya sudah menggunakan peran BPKP yaitu pendampingan (asistensi) sebagai faktor pendukung yang mempengaruhi opini dan temuan audit, namun dalam penelitiannya tersebut, baik peran dan pendampingan (asistensi) BPKP berfokus pada peran konsultasi. Penelitian ini menguji secara kuantitatif apakah peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap opini dan temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian ini tidak hanya meneliti asistensi (pendampingan) BPKP tetapi juga peran lainnya seperti audit, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan bimbingan teknis. Selain itu, penelitian ini juga melihat peran BPKP terkait opini dan temuan audit di daerah seperti perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit. Penelitian ini diharapkan

mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai peran BPKP sebagai lembaga pemerintah khususnya di bidang pengawasan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa peran audit internal BPKP yaitu peran audit kinerja dan audit operasional berpengaruh positif terhadap opini audit dan berpengaruh negatif terhadap nominal temuan audit.

2. Tinjauan Teoritis

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, BPK menyusun dan menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setiap jenis pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan output yang berbeda. Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan.

Ada empat jenis opini yang dapat diberikan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Terhadap 523 LKPD Tahun 2012, sebagian besar opini yang diterima pemerintah daerah adalah WDP yaitu sebanyak 61%, sedangkan hanya sebesar 23% dengan opini WTP. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan lembaga audit, audit dapat dibedakan menjadi audit eksternal dan audit internal. Peran audit internal menurut Standar Audit APIP dan IIA dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *assurance* dan konsultasi. Lembaga audit di Indonesia yang berfungsi sebagai auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga auditor internal antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. BPKP merupakan lembaga yang berada di tingkat nasional. Selain itu pada internal pemerintahan di peringkat departemen, Inspektorat Jendral berfungsi sebagai auditor internal, Inspektorat Wilayah Provinsi pada tingkat provinsi dan Inspektorat Wilayah Kotamadya dan Kabupaten di tingkat Kotamadya/Kabupaten.

Pengelompokkan audit internal yang dilakukan BPKP terbagi atas audit kinerja, audit keuangan dan audit dengan tujuan tertentu. Penugasan audit yang dilakukan BPKP pada dasarnya merupakan hasil permintaan *stakeholder* atau instruksi Presiden sehingga peran audit BPKP sangat terkait dengan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah termasuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan asistensi (pendampingan) Perwakilan BPKP pada pemda telah berjalan cukup lama. Jumlah pelaksanaan asistensi yang dilaksanakan Perwakilan BPKP pada pemda mengalami peningkatan sejalan dengan perubahan paradigma dan visi BPKP. Kegiatan asistensi adalah kegiatan pendampingan dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP terhadap pejabat/staf pemda, untuk membantu pemda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dan peningkatan kemampuan SDM (*capacity building*), dalam bentuk sosialisasi, pelatihan/*workshop*, bimbingan teknis, dan pendampingan, termasuk kegiatan sinergi pengawasan seperti audit, evaluasi dan reuiu.

Selain kegiatan asistensi, peran BPKP dalam konsultasi sebagian besar diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) merupakan bentuk pembinaan BPKP pada pemerintah daerah sebagai auditor internal.

Bimbingan teknis adalah bimbingan dan konsultasi oleh fasilitator dalam membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Peran BPKP lainnya yaitu monitoring (pemantauan) dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dan bagian integral dari perencanaan.

Dalam penelitiannya, Aikins (2011) meneliti hubungan peran audit internal pemerintah terhadap peningkatan kinerja keuangan. Penelitian ini menguji secara empiris bagaimana pekerjaan audit internal pemerintah membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Aikins (2011) juga menginvestigasi sejauh mana audit internal berkontribusi untuk meningkatkan kelayakan dan efektivitas pengendalian internal terhadap manajemen keuangan pemerintah, dan pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini merujuk pada perubahan persentase dalam aset neto pemerintah yang merupakan gambaran perubahan surplus atau defisit operasi pemerintah.

Penelitian Aikins (2011) didukung oleh Chelimo dan Kariuki (2013) yang mengevaluasi fungsi audit internal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kenya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi fungsi audit internal dalam pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah Eldoret di Kenya. Chelimo dan Kariuki (2013) menjelaskan bahwa tujuan audit internal harus menambah nilai dan meningkatkan operasi dan struktur pengendalian organisasi. Audit internal menyediakan, baik pemerintah dan pihak berelasi lainnya, suatu alat untuk memahami sejauh mana institusi publik memberikan pelayanan yang efektif dan sesuai anggaran. Penelitian Chelimo dan Kariuki (2013) menjelaskan efek yang signifikan dari fungsi audit internal dalam pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah Eldoret.

Di Indonesia, penelitian tentang kualitas audit LKPD telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2011) dan Wicaksono (2012). Nuraeni (2011) menjelaskan hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dengan

kualitas audit atas LKPD Kabupaten/Kota yang menganalisis apakah faktor karakteristik tersebut mempunyai dampak terhadap kualitas audit BPK atas LKPD Kabupaten/Kota selama tahun 2008-2009 yang diprosikan dengan opini dan temuan audit. Faktor-faktor yang diteliti Wicaksono (2012) terdiri dari karakteristik pemerintah daerah, karakteristik auditor dan pendampingan BPKP dalam pembuatan laporan keuangan sebagai faktor pendukung.

2.1 Pengembangan Hipotesis

Salah satu peran BPKP adalah melakukan asistensi (pendampingan) kepada lembaga pemerintah yang memerlukannya, termasuk pemerintah daerah. BPKP melakukan asistensi (pendampingan) di pemerintah daerah melalui Perwakilan BPKP yang tersebar di setiap ibukota provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah dan Perwakilan BPKP harus menjalin hubungan sebagai mitra kerja. Perwujudan kemitraan tersebut dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/MoU*).

Nuraeni (2011) meneliti bahwa pendampingan BPKP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dari sisi opini audit. Menurut Nuraeni (2011) pengaruh negatif dapat terjadi karena pendampingan atau asistensi yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Wicaksono (2012) menguji kembali pengaruh pendampingan BPKP terhadap opini dan temuan audit LKPD. Wicaksono (2012) menemukan bahwa pendampingan BPKP berpengaruh negatif terhadap opini audit. Akan tetapi, pendampingan berpengaruh positif terhadap temuan kelemahan SPI dan berpengaruh negatif terhadap temuan ketidakpatuhan regulasi.

Banyaknya asistensi (pendampingan) BPKP pada suatu pemerintah daerah diharapkan dapat semakin membantu pemerintah daerah. Semakin banyak asistensi (pendampingan) BPKP terhadap pemerintah daerah seharusnya memiliki dampak terhadap pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan mendapatkan asistensi (pendampingan) pemerintah daerah berkesempatan untuk memperbaiki kualitas laporan

keuangan yang dilihat dari opini dan temuan audit BPK. Untuk itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : Asistensi (pendampingan) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat opini audit

H_{1b} : Asistensi (pendampingan) memiliki pengaruh negatif terhadap nominal temuan audit

Aikins (2012) mengungkapkan temuan hasil penelitiannya bahwa auditor internal pemerintah memegang peran yang signifikan dalam manajemen keuangan publik dan operasi pemerintah. Penelitian ini akan menguji pengaruh penugasan audit BPKP di pemerintah daerah terhadap opini dan temuan audit LKPD. Audit intern BPKP yang dilihat pada penelitian ini meliputi audit kinerja dan audit operasional terkait keuangan pemerintah daerah antara lain dana pinjaman (*loan*) kepada Indonesia yang diberikan untuk pemerintah daerah atau dana dari pemerintah pusat atas suatu program nasional. Penelitian ini tidak mengikutsertakan audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPKP.

Audit intern yang dilakukan BPKP salah satunya bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sebelum audit ekstern dilakukan oleh BPK sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat diyakini kebenaran dan akurasinya. Semakin banyaknya kegiatan audit yang dilakukan BPKP di pemerintah daerah diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian untuk variabel penugasan audit adalah sebagai berikut:

H_{2a} : Penugasan audit kinerja dan operasional BPKP tahun yang lalu memiliki pengaruh positif terhadap tingkat opini audit tahun ini

H_{2b} : Penugasan audit kinerja dan operasional BPKP tahun yang lalu memiliki pengaruh negatif terhadap nominal temuan audit tahun ini

Monitoring dan evaluasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dimana evaluasi memerlukan hasil dari monitoring yang kemudian akan digunakan untuk kontribusi program. Penelitian ini menguji peran monitoring dan evaluasi BPKP yang meliputi monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana di pemerintah daerah serta monitoring dan evaluasi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi (monev) sangat diperlukan dan penting bagi penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Monev yang dilakukan BPKP merupakan peran BPKP pada pemerintahan daerah yang diwujudkan melalui program kerja pengawasan yang berasal dari permintaan stakeholder. Oleh karena itu, hipotesis penelitian untuk variabel monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

H_{3a} : Monitoring dan evaluasi tahun yang lalu memiliki pengaruh positif terhadap tingkat opini audit tahun ini

H_{3b} : Monitoring dan evaluasi tahun yang lalu memiliki pengaruh negatif terhadap nominal temuan audit tahun ini

Sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan kegiatan konsultansi yang dilaksanakan BPKP di pemerintah daerah. Menurut Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013), konsultansi, sosialisasi, dan asistensi termasuk bagian dari kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting). Sedangkan, bimbingan teknis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sosialisasi dan terkadang dilakukan bersamaan. Sosialisasi dan bimtek dibedakan dari asistensi (pendampingan) berdasarkan output, proses pelaksanaan dan jangka waktu penugasan.

Penelitian ini menguji peran sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan BPKP yang meliputi sosialisasi dan bimtek terkait regulasi pelaksanaan keuangan bagi pemerintah daerah seperti sosialisasi akuntansi berbasis akrual, sosialisasi dan bimtek penatausahaan keuangan daerah, dan juga sosialisasi pengendalian intern pemerintah. Peran sosialisasi dan bimtek BPKP bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memahami dan menghadapi perkembangan yang terjadi khususnya terkait keuangan pemerintah daerah.

Sosialisasi dan bimbingan teknis pada pemerintah daerah diharapkan dapat memperjelas dan mempermudah pemerintah daerah dalam operasionalisasi pemerintahan seperti penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan BPKP, opini audit diharapkan dapat semakin membaik dan temuan audit semakin berkurang. Oleh karena itu, hipotesis penelitian untuk variabel sosialisasi dan bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

- H_{4a}** : Sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki pengaruh positif terhadap tingkat opini audit
- H_{4b}** : Sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki pengaruh negatif terhadap nominal temuan audit

Perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut temuan audit pada pemerintah daerah merupakan kegiatan BPKP yang berhubungan dengan kegiatan reviu dan pendampingan laporan keuangan. Manfaat yang diperoleh bagi pemerintah daerah adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP.

Penelitian ini akan menguji pengaruh kegiatan tersebut terhadap opini dan temuan audit LKPD. Perbaikan opini dan tindak lanjut temuan (TL) seharusnya memiliki dampak

terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian untuk variabel peningkatan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit adalah sebagai berikut:

H_{5a} : Peran BPKP dalam perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut temuan audit di tahun yang lalu membantu pemerintah daerah mendapatkan tingkat opini audit yang lebih baik di tahun ini

H_{5b} : Peran BPKP dalam perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut temuan audit tahun yang lalu membantu pemerintah daerah mendapatkan nominal temuan audit yang lebih kecil di tahun ini

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari berbagai sumber.

Model penelitian ini terbagi atas dua, yaitu model penelitian opini audit dan model penelitian temuan audit yang melihat pengaruh peran BPKP di tahun 2012 terhadap opini dan temuan audit BPK di tahun 2012 dengan mempertimbangkan adanya efek lag maka dilihat pengaruh peran BPKP tahun 2011 untuk variabel AUDIT, MONEV dan QUAL. Pengujian model akan menggunakan metode regresi dan data *cross section*. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen opini audit adalah model ordinal logistik (*ordered logit*).

$$OPINI_i = \beta_0 + \beta_1 ASIST_i + \beta_2 AUDIT_{it-1} + \beta_3 MONEV_{it-1} + \beta_4 SOC_i + \beta_5 QUAL_{it-1} + \beta_6 TYPE_i + \beta_7 SIZE_i + \beta_8 DEPEND_i + e_i$$

$$\text{NOMFIND}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ASIST}_i + \beta_2 \text{AUDIT}_{i-1} + \beta_3 \text{MONEV}_{i-1} + \beta_4 \text{SOC}_i + \beta_5 \text{QUAL}_{i-1} + \beta_6 \text{TYPE}_i + \beta_7 \text{SIZE}_i + \beta_8 \text{DEPEND}_i + e_i$$

Keterangan: OPINI: Opini Audit, NOMFIND: Nominal Temuan Audit, ASIST: Asistensi BPKP, AUDIT: Audit Kinerja dan Audit Operasional BPKP, MONEV: Monitoring dan Evaluasi BPKP, SOC: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BPKP, QUAL: Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Audit, SIZE: Ukuran Pemerintah Daerah, DEPEND: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, TYPE: Jenis (tipe) Pemerintah Daerah

Pengukuran variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol dapat dilihat pada tabel 1.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2. Dari 489 kabupaten/kota yang dijadikan sampel hanya 102 yang memperoleh opini WTP atau hanya 20,9% dari seluruh sampel dan 309 kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP atau sekitar 63,2% dari seluruh sampel. Akan tetapi, setidaknya jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah perolehan dua opini terendah yaitu opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dimana pemerintah daerah yang memperoleh TW adalah 6 kabupaten/kota dan 72 kabupaten/kota yang memperoleh opini TMP.

Dari 489 sampel kabupaten/kota, rata-rata jumlah temuan audit di tahun 2012 sebanyak 25,5 kasus dengan jumlah temuan audit terbanyak yaitu 130 kasus di Kabupaten Buru Selatan. Pemerintah daerah dengan jumlah temuan paling sedikit di tahun 2012 adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Sambas yang masing-masing sebanyak 6 kasus. Rata-rata nominal temuan audit sebesar Rp6.068.909.018.

Rata-rata peran BPKP berupa asistensi (pendampingan) di pemerintah daerah selama tahun 2012 sebesar 5,6. Peran audit intern yang dilakukan BPKP yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada audit kinerja dan audit operasional. Rata-rata peran audit kinerja dan audit operasional BPKP di tahun yang lalu sebanyak 6,21. Monitoring dan evaluasi BPKP yang dilakukan di pemerintah daerah meliputi monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana di pemerintah daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Penguatan Desentralisasi Fiskal, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah dan juga terkait pembangunan nasional seperti monitoring prioritas pembangunan nasional. Rata-rata monitoring dan evaluasi di tahun yang lalu sebesar 6,2.

Rata-rata sosialisasi dan bimtek di tahun 2012 adalah 3,5. Pada penelitian ini sosialisasi dan bimtek yang dilakukan di tahun 2012 meliputi sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan (Perpres, Permendagri, PMK, KMK dan lainnya), manajemen aset daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pedoman akuntansi.

Perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan merupakan kegiatan yang saling berkaitan karena berhubungan dengan opini dan temuan audit. BPKP sebagai auditor intern pemerintah berperan untuk membantu dan mendampingi pemerintah daerah dalam menindak lanjut temuan BPK. Selain itu, dalam kegiatan ini juga termasuk monitoring tindak lanjut temuan audit intern BPKP yang menjadi salah satu tolok ukur BPKP dalam kegiatan perbaikan kualitas laporan keuangan. Rata-rata perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan di tahun yang lalu 0,25.

4.2 Uji Hipotesis

Pengaruh Peran BPKP terhadap Opini Audit

Dapat dilihat dari tabel 3, asistensi (pendampingan) BPKP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Cakupan variabel independen asistensi (pendampingan) BPKP dalam penelitian ini lebih luas dibanding penelitian Nuraeni (2011) dan Wicaksono (2012) sebelumnya yang hanya terbatas pada Asistensi SAKD dan SIMDA saja.

Agar asistensi (pendampingan) BPKP memiliki pengaruh BPKP dapat meningkatkan frekuensi peran asistensi (pendampingan) secara merata dan seimbang untuk setiap pemerintah daerah dan dapat dikatakan untuk pemerintah daerah yang mendapatkan asistensi (pendampingan) BPKP lebih dari 12 kali dalam setahun kurang efektif karena rata-rata pemerintah daerah tersebut sudah memiliki opini audit yang memadai.

Dari tabel 3 diketahui bahwa audit kinerja dan audit operasional yang dilakukan BPKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit yang berarti H_{2a} diterima dan semakin banyak audit intern berupa audit kinerja dan audit operasional yang dilakukan BPKP, maka semakin baik opini audit yang diterima pemerintah daerah tersebut. Nilai *odds ratio* pada tabel 3 dapat diinterpretasikan sebagai nilai pengaruh perubahan variabel terikat (dependen). Variabel independen AUDIT berpengaruh signifikan terhadap OPINI dan memiliki hubungan positif terhadap peningkatan probabilitas OPINI. Artinya, untuk setiap peningkatan satu satuan variabel AUDIT, akan meningkatkan probabilitas naiknya OPINI sebesar 1,065 kali.

Monitoring dan Evaluasi (monev) BPKP tahun yang lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit dan H_{3a} ditolak. Hal tersebut berarti peran BPKP melalui monitoring dan evaluasi di tahun yang lalu tidak berjalan dengan efektif sehingga kurang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Monev yang dilakukan BPKP belum efektif dapat disebabkan pemerintah daerah yang mendapatkan monev terkadang tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan setelah monev berakhir karena berbagai hal seperti kapabilitas daerah dan pimpinan, kondisi politik, daerah dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan monev yang dilakukan kurang memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah.

Sosialisasi dan bimbingan teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit dan H_{4a} ditolak. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada pemerintah daerah belum berjalan efektif yang dapat disebabkan kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam mengimplementasikan yang sudah disosialisasikan oleh BPKP. Frekuensi sosialisasi dan bimtek yang belum seimbang dan merata untuk setiap pemerintah daerah. Hal ini karena sosialisasi dan bimtek merupakan bentuk peran BPKP dalam

konsultansi dan pemerintah daerah diperbolehkan mendapatkan konsultansi dari luar BPKP. Pemerintah daerah juga dapat tidak menerima sosialisasi dan bimtek dari BPKP.

Nilai *p* QUAL pada tabel 3 menunjukkan bahwa QUAL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit yang berarti perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut (TL) temuan audit di tahun yang lalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit tahun ini. Nilai *odds ratio* pada tabel 3 menunjukkan perubahan probabilitas tercapainya suatu kategori dalam variabel dependen sebagai pengaruh atas perubahan variabel independennya. Variabel independen QUAL berpengaruh signifikan terhadap OPINI dan memiliki hubungan negatif terhadap peningkatan probabilitas OPINI. Artinya, untuk setiap peningkatan satu satuan variabel QUAL, akan menurunkan probabilitas naiknya OPINI sebesar 0,689 kali.

Dapat dilihat bahwa dari 124 pemda yang mendapatkan peran BPKP ini, 15 di antaranya menerima opini audit TMP, 1 pemda menerima opini TW dan hanya 25 pemda yang menerima opini audit WTP. Hal ini menunjukkan bahwa agar BPKP dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit BPK, maka perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut (TL) temuan audit merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu dan dilakukan secara terus menerus serta tidak terbatas hanya pada satu tahun anggaran saja.

Adanya kegiatan perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut (TL) temuan audit ini diharapkan semakin baik opini yang didapatkan pemda. Akan tetapi, masih terdapat pemda yang menerima opini kurang bagus. Hal ini dapat disebabkan pada dasarnya kondisi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sudah tidak baik sehingga membutuhkan waktu lebih lama bagi BPKP untuk membantu meningkatkan opini.

Pengaruh Peran BPKP terhadap Temuan Audit

Banyaknya asistensi tahun ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nominal temuan tahun ini yang dapat dilihat tabel 3 yang berarti H_{1b} ditolak. Hal ini dapat disebabkan karena kurang efektifnya asistensi (pendampingan) yang diberikan BPKP kepada pemerintah daerah di tahun berjalan. Sebagaimana yang dikemukakan Wicaksono (2012) bahwa pengaruh yang tidak signifikan dari asistensi (pendampingan) dapat terjadi karena pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan keuangan daerah baik dengan BPKP ataupun dengan konsultan pemerintahan di luar BPKP.

Audit kinerja dan audit operasional BPKP tahun yang lalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nominal temuan audit. Nilai p audit kinerja dan audit operasional BPKP tahun yang lalu menunjukkan audit kinerja dan audit operasional BPKP tahun yang lalu berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 99% dan H_{2b} diterima. Hal ini berarti semakin tinggi frekuensi audit yang dilakukan BPKP maka nominal temuan akan semakin sedikit. Hal ini dapat disebabkan audit kinerja dan audit operasional yang dilakukan BPKP telah meningkatkan akurasi penyajian pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Monitoring dan Evaluasi (monev) tahun yang lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap nominal temuan dan H_{3b} ditolak. Hal ini berarti frekuensi monev yang dilakukan BPKP di daerah tidak memiliki pengaruh terhadap nominal temuan audit BPKP atas LKPD. Hal ini belum terlaksana dengan baik yang dapat disebabkan monev yang dilakukan tekonsentrasi pada daerah tertentu saja. Dari data yang diamati, frekuensi monev tertinggi pada pemerintah daerah tingkat kota. Oleh karena itu, pelaksanaan monev BPKP belum merata di seluruh daerah dengan jumlah frekuensi monev yang berimbang.

Nilai p statistik variabel SOC terhadap NOMFIND pada tabel 3 menunjukkan SOC tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan audit dan H_{4b} ditolak. Hal ini dapat disebabkan

oleh kegiatan yang dilakukan BPKP ini belum merata ke seluruh daerah sehingga manfaatnya belum terlalu berdampak bagi pemerintah daerah. Terdapat 71 dari 489 pemda yang selama tahun 2012 tidak mendapatkan peran sosialisasi dan bimtek BPKP. Hal ini dapat dikarenakan pemda tidak menerima peran BPKP tersebut atau karena pemerintah daerah tersebut tidak menjadi prioritas daerah yang menjadi tujuan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan BPKP. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah mendapatkan sosialisasi dan bimtek BPKP, tetapi sosialisasi dan bimtek yang diberikan tidak dipantau kelanjutannya sehingga terkadang banyak pemda yang masih belum memahami dan pada akhirnya, tidak mengimplementasikan yang telah disosialisasikan dan dibimbing.

Dapat dilihat dari tabel 3, variabel independen QUAL tidak berpengaruh signifikan terhadap nominal temuan maka H_{5b} ditolak. Hal ini dapat disebabkan masih sedikitnya perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit yang dilakukan BPKP karena peran BPKP ini bukan menjadi prioritas program kerja pengawasan tahunan BPKP.

Pengujian Subsampel

Dari 489 sampel yang digunakan terdapat 124 pemerintah daerah yang mendapatkan perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit. Pada pengujian tambahan ini sampel yang digunakan pada model penelitian yang telah digunakan sebelumnya adalah 124 pemerintah daerah tersebut. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4. Pada pengujian subsampel, model temuan audit yang diukur dengan nominal temuan audit tidak signifikan karena memiliki nilai $prob > F$ yang lebih besar dari 0,05 sehingga pada pengujian ini model temuan audit diukur dengan jumlah temuan audit.

Dapat dilihat bahwa variabel independen ASIST dan SOC berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen OPINI. Variabel independen ASIST berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, peran asistensi (pendampingan) BPKP pada 124 pemerintah daerah

mempengaruhi opini audit BPK. Pada model temuan audit TOTFIND ditunjukkan bahwa variabel independen ASIST berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen TOTFIND. Artinya, pada 124 pemerintah daerah semakin banyak dilakukan asistensi (pendampingan), maka akan semakin sedikit jumlah temuan audit.

4.3 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengganti pengukuran variabel independen dan variabel dependen, antara lain dengan mengganti model temuan audit yang diprosikan dengan jumlah temuan audit, mengganti model opini audit yang diprosikan dengan kriteria perankingan yang berbeda dan pengujian subsampel.

Variabel Dependen Opini Audit

Penelitian ini mempertimbangkan beberapa kategori perankingan opini antara lain; pertama, dengan mengurutkan tingkat opini audit dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu (1) Kriteria satu jika 3 untuk Wajar Tanpa Pengecualian, 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian, 1 untuk Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat; (2) Kriteria dua untuk urutan tingkat opini audit secara biner yaitu 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian, 0 untuk opini lainnya; dan (3) Kriteria tiga untuk urutan tingkat opini audit secara biner yaitu 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian, 0 untuk opini lainnya. Hasil uji sensitivitas dapat dilihat pada tabel 5.

Hasil uji regresi untuk ketiga model tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada model penelitian dengan variabel dependen opini audit yang diukur dengan kriteria ranking pada poin pertama menunjukkan hasil yang sama dengan model penelitian yang telah diuji sebelumnya dimana variabel AUDIT dan QUAL berpengaruh signifikan terhadap OPINI. Nilai p statistik pada pengujian ini juga tidak jauh berbeda dengan pengujian ordered logit model opini sebelumnya.

Apabila variabel dependen opini audit diukur dengan kriteria ranking pada poin kedua, maka hasil yang ditunjukkan juga tidak jauh berbeda, hanya saja pada pengujian kali ini variabel independen QUAL dan variabel kontrol TYPE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen OPINI. Pada pengujian berikutnya dengan menggunakan variabel dependen OPINI yang diukur menurut kriteria ketiga, dapat diketahui bahwa variabel independen ASIST, AUDIT dan QUAL berpengaruh signifikan terhadap OPINI. ASIST dan AUDIT berpengaruh positif dan signifikan terhadap OPINI yang artinya H1a dan H2a diterima. Pada pengujian regresi ordinal dengan model penelitian di awal, tidak menunjukkan hasil yang sama dimana ASIST tidak berpengaruh signifikan terhadap OPINI di pengujian model opini sebelumnya.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan bahwa variabel independen peran BPKP yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit, yaitu audit kinerja dan audit operasional BPKP di tahun yang lalu serta perbaikan kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut (TL) temuan audit di tahun yang lalu. Sementara itu, variabel kontrol yang digunakan yaitu karakteristik pemerintah daerah yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit adalah tipe (jenis) pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

Hasil pengujian pada model temuan audit menyimpulkan bahwa peran BPKP yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nominal temuan yaitu audit tahun yang lalu. Karakteristik pemerintah daerah yang berpengaruh signifikan terhadap nominal temuan audit adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

BPKP sebagai auditor intern pemerintah memiliki peran vital dalam membantu manajemen mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rentang waktu yang

cukup lama berdirinya suatu lembaga belum ada penelitian yang mengemukakan peran BPKP dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan peran BPKP pada pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap opini dan temuan audit BPK atas LKPD. Penelitian ini mempertimbangkan adanya efek *lag* pada model penelitian sehingga turut menguji variabel independen tahun yang lalu terhadap variabel dependen.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah ketersediaan data. LKPD dan IHPS yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk tahun anggaran 2012. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian yang digunakan dan kelengkapan LKPD dan data pengawasan BPKP lebih memadai untuk dilakukan penelitian mendatang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, untuk melengkapi data sekunder dapat ditambahkan data primer dimana terkait peran BPKP tidak memasukkan tanggapan langsung dari pihak terkait, maka untuk ke depannya, diharapkan dapat melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai APIP dan stakeholders BPKP agar dapat memberikan hasil analisis yang lebih berimbang dan lengkap.

Daftar Referensi

- Aikins, S. K. (2011). An Examination of Government Internal Audit's Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*, 11, (4), 306-337
- Anderson, Urton. (2003). Opportunities in Internal Auditing. *The Institute of Internal Auditors*, 97-129.
- Andriani, Evanti. (2012). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2013. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Oktober 31, 2014.

<http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

<http://www.bpkp.go.id/konten/1/Tugas-dan-Fungsi.bpkp>

<http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp>

Gujarati, D. (2010). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.

Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

Hanri, Muhammad. 2009. Sistem Peringatan Dini Krisis Nilai Tukar: Kasus Indonesia Tahun 1990 – 2008. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.

Nachrowi, & Usman, H. (2006). Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti, A. 2010. Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.

Nuraeni. 2010. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standar, dan Metode. Surabaya: Aksara Satu.

Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., & Scheiner, J.H. (2003). The Practice of Modern Internal Auditing. Almonte Spring: Institute of Internal Auditors, Inc.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Wicaksono, Pangah Tri. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini dan Temuan Audit BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2009. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Winanti, Bella Ahyu. 2014. Analisis Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Legitimasi Kepala Daerah serta Pengawasan Pemerintahan terhadap Opini Audit LKPD Tahun 2010-2011. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Daftar Tabel

Tabel 1. Ikhtisar Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Pengukuran
1.	Opini Audit	4 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 : Tidak Wajar (TW) 1 : Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
2.	Temuan Audit	Logaritma Natural (Ln) nominal temuan audit
3.	Asistensi (Pendampingan)	Jumlah banyaknya (frekuensi) penugasan asistensi (pendampingan) BPKP di kabupaten/kota
4.	Audit Kinerja dan Operasional	Jumlah banyaknya (frekuensi) penugasan audit kinerja dan operasional BPKP tahun yang lalu di kabupaten/kota
5.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah banyaknya (frekuensi) penugasan sosialisasi dan bimbingan teknis BPKP di kabupaten/kota
6.	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah banyaknya (frekuensi) penugasan monitoring dan evaluasi BPKP tahun yang lalu di kabupaten/kota
7.	Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan	1 : Ada penugasan perbaikan opini dan TL temuan audit di tahun yang lalu 0 : Tidak ada
8.	Tipe (Jenis) Pemerintah Daerah	1 : Pemerintah Daerah Kota 0 : Pemerintah Daerah Kabupaten
9.	Ukuran Pemerintah Daerah	Logaritma Natural (Ln) dari Total Aset
10.	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	(Total Pendapatan Transfer / Total Pendapatan)

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
OPINI	2,90	1	4	0,90
NOMFIND (juta Rp)	6.068,91	0	346.393,42	19.152,00
ASIST	5,58	0	38	5,12
AUDIT _{t-1}	6,21	0	16	4,06
MONEV _{t-1}	6,20	0	28	5,41
SOC	3,46	0	26	3,46
QUAL _{t-1}	0,25	0	1	0,44
SIZE (juta Rp)	2.326.132,46	274.389,29	35.358.824,16	2.678.424,68
DEPEND	0,90	0,27	0,99	0,08
TYPE	0,19	0	1	0,39

Keterangan: OPINI: Opini Audit, NOMFIND: Nominal Temuan Audit, ASIST: Asistensi BPKP, AUDIT: Audit Kinerja dan Audit Operasional BPKP, MONEV: Monitoring dan Evaluasi BPKP, SOC: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BPKP, QUAL: Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Audit, SIZE: Ukuran Pemerintah Daerah, DEPEND: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, TYPE: Jenis (tipe) Pemerintah Daerah

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Model Opini Audit					Variabel	Model Temuan Audit			
	<i>Expected Sign</i>	Coef.	P stat	Sig	<i>Odds Ratio</i>		<i>Expected Sign</i>	Coef.	P stat	
ASIST	(+)	0,008	0,378		1,008	ASIST	(-)	0,001	0,491	
AUDIT_{t-1}	(+)	0,063	0,010	***	1,065	AUDIT_{t-1}	(-)	-0,120	0,006	***
MONEV_{t-1}	(+)	0,013	0,250		1,013	MONEV_{t-1}	(-)	0,010	0,337	
SOC	(+)	0,021	0,300		1,021	SOC	(-)	0,027	0,273	
QUAL_{t-1}	(+)	-0,373	0,055	*	0,689	QUAL_{t-1}	(-)	0,220	0,272	
SIZE	(+)	0,512	0,003	***	1,669	SIZE	(-)	0,046	0,399	
DEPEND	(+)	-7,185	0,000	***	0,001	DEPEND	(-)	3,680	0,027	*
TYPE	(+)	0,525	0,029	**	1,691	TYPE	(-)	-0,142	0,355	
Pseudo R2		0,087				Prob > F		0,001		
Prob>chi2		0,000				Adj R-squared		0,024		

Keterangan: Signifikan pada tingkat ***1%; **5%; *10%; ASIST: Asistensi BPKP, AUDIT: Audit Kinerja dan Audit Operasional BPKP, MONEV: Monitoring dan Evaluasi BPKP, SOC: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BPKP, QUAL: Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Audit, SIZE: Ukuran Pemerintah Daerah, DEPEND: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, TYPE: Jenis (tipe) Pemerintah Daerah

Tabel 4. Hasil Pengujian Subsampel

Variabel	Model Opini Audit				
	<i>Expected Sign</i>	<i>Odds Ratio</i>	Coef.	P stat	
ASIST	(+)	1,075	0,073	0,077	*
AUDIT_{t-1}	(+)	1,072	0,069	0,142	
MONEV_{t-1}	(+)	1,017	0,017	0,355	
SOC	(+)	0,848	-0,165	0,019	**
QUAL_{t-1}	(+)	0,877	-0,131	0,286	
SIZE	(+)	1,511	0,413	0,153	
DEPEND	(+)	0,001	-7,520	0,011	**
TYPE	(+)	2,531	0,929	0,046	**
Pseudo R ²	0,148				
Prob>chi2	0,000				

Keterangan: Signifikan pada tingkat ***1%; **5%; *10%; TOTFIND: Total Temuan Audit, ASIST: Asistensi BPKP, AUDIT: Audit Kinerja dan Audit Operasional BPKP, MONEV: Monitoring dan Evaluasi BPKP, SOC: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BPKP, QUAL: Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Audit, SIZE: Ukuran Pemerintah Daerah, DEPEND: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, TYPE: Jenis (tipe) Pemerintah Daerah

Tabel 5. Uji Regresi Model Opini Audit

Variabel	Model Opini Kriteria 1				Model Opini Kriteria 2				Model Opini Kriteria 3		
	<i>Expected Sign</i>	Coef.	P stat		<i>Expected Sign</i>	Coef.	P stat		<i>Expected Sign</i>	Coef.	P stat
ASIST	(+)	0,022	0,242		(+)	0,011	0,419		(+)	0,049	0,079 *
AUDIT_{t-1}	(+)	0,069	0,016	***	(+)	0,076	0,070	*	(+)	0,050	0,093 *
MONEV_{t-1}	(+)	0,009	0,347		(+)	0,040	0,163		(+)	-0,009	0,377
SOC	(+)	-0,018	0,346		(+)	-0,040	0,296		(+)	0,000	0,500
QUAL_{t-1}	(+)	-0,426	0,030	***	(+)	-0,291	0,202		(+)	-0,594	0,023 ***
SIZE	(+)	0,550	0,001	***	(+)	0,828	0,002	***	(+)	0,315	0,072 *
DEPEND	(+)	-6,477	0,000	***	(+)	-19,313	0,000	***	(+)	-4,521	0,005 ***
TYPE	(+)	0,439	0,050	**	(+)	0,438	0,177		(+)	0,495	0,050 **
Pseudo R ²	0,089				0,202				0,089		
Prob>chi2	0,000				0,000				0,000		

Keterangan: Signifikan pada tingkat ***1%; **5%; *10%; TOTFIND: Total Temuan Audit, ASIST: Asistensi BPKP, AUDIT: Audit Kinerja dan Audit Operasional BPKP, MONEV: Monitoring dan Evaluasi BPKP, SOC: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BPKP, QUAL: Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Temuan Audit, SIZE: Ukuran Pemerintah Daerah, DEPEND: Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, TYPE: Jenis (tipe) Pemerintah Daerah